



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IQBAL  
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA  
SAMA  
3. NHK : 925857

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.485.600.000

1. Tanah Seluas 2485.86 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI  
Rp. 90.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/240 m2 di KAB / KOTA ACEH  
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 564.000.000  
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000  
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000  
5. Tanah Seluas 318 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL  
SENDIRI Rp. 381.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 464.000.000

1. MOTOR, HONDA BIET Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000  
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000  
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
450.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	104.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.053.600.000
III. HUTANG	Rp.	164.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.889.600.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.